

LKPD DIGITAL

**PERUMUSAN DAN
PENGESAHAN UUD NRI 1945**



PENDIDIKAN PANCASILA
SMP N 1 BANTUL

PETUNJUK BELAJAR

Bacalah petunjuk belajar berikut sebelum memulai!

- Sebelum mengerjakan lembar kerja ini, silahkan baca dan pahami sub materi perumusan dan pengesahan UUD NRI 1945 dalam buku paket atau sumber buku yang lain
- Kerjakan setiap lembar kerja sesuai perintah yang diberikan
- Kerjakan lembar kerja secara individu
- Jika sudah selesai silahkan isi identitas kalian dikolom yang tersedia
- Klik tombol finis untuk mengakhirinya

Tujuan Pembelajaran

- Memahami sejarah perumusan UUD NRI 1945
- Memahami sejarah pengesahan UUD NRI 1945
- Memahami tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan dan pengesahan UUD NRI 1945

APERSEPSI

Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silahkan
amati video dibawah ini!



Agar kalian lebih paham mengenai materi ini, silahkan baca artikel dibawah ini!

Perumusan UUD NRI 1945

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia yang disusun sebagai konstitusi negara setelah proklamasi kemerdekaan. Proses perumusannya melibatkan beberapa tahapan penting yang dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsa dalam waktu yang relatif singkat.

1. Latar Belakang Perumusan UUD 1945

Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Jepang yang saat itu terdesak dalam Perang Dunia II berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk mendapatkan dukungan rakyat. Hal ini mendorong pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang *Dokuritsu Junbi Cosakai*.

- BPUPKI dibentuk oleh Jepang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chui Sangi In
- BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat.
- Tujuan BPUPKI: Menyusun dasar negara dan konstitusi sebagai landasan pemerintahan Indonesia setelah merdeka.



Ketua BPUPKI
Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Materi Perumusan UUD NRI 1945

2. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Pada sidang pertama BPUPKI, yang berlangsung dari 29 Mei-1 Juni 1945, para tokoh bangsa membahas dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia. Dalam sidang ini, muncul beberapa pandangan tentang dasar negara, termasuk dari tiga tokoh penting:

- Moh. Yamin (29 Mei 1945)

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat



- Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Sosial

- Soekarno (1 Juni 1945)

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa.



Tanggal 1 Juni 1945 kemudian dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila.

Materi Perumusan UUD NRI 1945

3. Pembentukan Panitia Sembilan

Setelah sidang pertama, BPUPKI belum berhasil mencapai kesepakatan akhir mengenai dasar negara. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia Sembilan yang **diketahui oleh Soekarno** untuk merumuskan dan menyelaraskan pandangan-pandangan tersebut.

Anggota Panitia Sembilan:

SOEMUH MAKAR BAWA SABITNYA

Berikut penjelasannya:

Soe = **Soe**karno

Muh = **Muh.** Hatta

Ma = A.A **M**aramis

Kar = Abdul Ka**h**ar Muzakkir

Ba = Ahmad Soe**b**ardjo

Wa = **W**achid Hasyim

Sa = Agus **S**alim

Bit = Ab**i**kusno

nYa= Muh. **Y**amin



Ir. Soekarno



Mr. Prof. Moh. Yamin
Cokrosujoso S.H



Drs. Muhammad
Hatta



Mr. A.A. Maramis



Raden Abikusno
Tjokrosoejoso



Abdoel Kahar



H. Agus Salim



K.H. Wahid



Mr. Achmad

Materi Perumusan UUD NRI 1945

4. Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter* (22 Juni 1945)

Panitia Sembilan akhirnya menghasilkan sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini memuat lima sila yang menjadi dasar negara Indonesia:

1. **Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.**
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: **Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI)

Panitia Sembilan

Haji Soekarno
Haji Achmad Soebardjo
Haji Abdul Kahar Muzakir
Alex Andries Maramis

Abikoeso Tjokrosoejoso
Haji Mohammad Hatta
Haji Abdul Wahid Hasyim
Haji Agus Salim
Haji Mohammad Yamin

Materi Perumusan UUD NRI 1945

5. Sidang Kedua BPUPKI (10 – 16 Juli 1945)

Fokus utama sidang ini adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang akan digunakan oleh Indonesia setelah merdeka.

Panitia dalam Sidang Kedua BPUPKI

1. Panitia Perancang UUD bertugas merancang konsep utama UUD, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lembaga negara.
 - Ketua Panitia Perancang UUD: Ir. Soekarno
 - Anggota lainnya: Prof. Dr. Soepomo, Moh. Yamin, H. Agus Salim, dan tokoh-tokoh nasional lainnya.
2. Panitia Kecil bertugas menyusun rancangan detail pasal-pasal UUD, dengan Prof. Dr. Soepomo sebagai salah satu tokoh utamanya. Panitia ini terdiri dari Soepomo, Wongsonegoro, Subardjo, Maramis, Singgih, Salim dan Sukiman.
3. Panitia Kecil Ekonomi dan Keuangan mengatur rancangan kebijakan ekonomi yang akan menjadi dasar sistem perekonomian Indonesia.
4. Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta, yang menjadi dasar Pembukaan UUD 1945, memuat rumusan Pancasila.
5. Panitia Penghalus Bahasa memastikan bahasa yang digunakan dalam UUD 1945 sesuai dengan kaidah tata bahasa dan mudah dipahami oleh rakyat yang terdiri dari Dr. Husein Djajadiningrat, Prof. Dr. Soepomo dan H. Agoes Salim.

Materi Perumusan UUD NRI 1945

Pembahasan Utama dalam Sidang Kedua BPUPKI

1. Bentuk Negara

- Indonesia berbentuk negara kesatuan
- Bentuk pemerintahan yang dipilih adalah republik

2. Sistem Pemerintahan

- Sistem presidensial dipilih sebagai sistem pemerintahan Indonesia

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara

- UUD juga mengatur hak-hak dasar warga negara seperti:
 - Hak untuk hidup.
 - Hak atas pendidikan.
 - Hak kebebasan beragama.
- Kewajiban warga negara, seperti membela negara dan menjaga persatuan, juga diatur dalam UUD.

4. Lembaga-lembaga Negara

- Presiden: Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Sebagai badan yang mewakili rakyat dalam pembuatan undang-undang.
- Mahkamah Agung: Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berperan dalam menjaga keadilan dan mengawasi jalannya hukum.

Laporan Soekarno dan Soepomo

Pada tanggal 14 Juli 1945, hasil kerja Panitia Perancang UUD dipresentasikan oleh Ir. Soekarno di hadapan sidang pleno BPUPKI. Hasil tersebut mencakup rancangan UUD yang terdiri dari:

- Pembukaan UUD, yang memuat dasar negara Pancasila.
- Batang Tubuh UUD, yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan pembentukan lembaga-lembaga negara.

Prof. Dr. Soepomo juga memberikan pandangan mengenai **konsep negara integralistik**. Negara integralistik ini tidak mementingkan kepentingan individu atau golongan tertentu, melainkan menjaga persatuan seluruh rakyat.

Materi Perumusan UUD NRI 1945

6. Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam bahasa Jepang *Dokuritsu Junbi Inkai* pada 7 Agustus 1945. PPKI bertugas untuk menyempurnakan rancangan UUD dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI terdiri dari 21 anggota, dengan Soekarno sebagai ketua dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua. Selanjutnya ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang 6 orang sehingga total **27** orang anggota.

7. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945)

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi ini menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

8. Sidang PPKI (18 Agustus 1945)

Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan:

- Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia.
- Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia, dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
- Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan perubahan pada sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" (untuk mengakomodasi seluruh rakyat Indonesia).

9. Isi Pokok UUD 1945

UUD 1945 yang disahkan terdiri dari tiga bagian utama:

1. Pembukaan: Mengandung Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan negara Indonesia.
2. Batang Tubuh: Memuat aturan-aturan mengenai sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara.
3. Penjelasan: Menjelaskan lebih lanjut maksud dan isi dari batang tubuh.

LKPD 1

Pasangkan peristiwa dibawah ini beserta tanggalnya!

Sidang
BPUPKI
pertama
dimulai

1 Juni 1945

Pembentukan
Panitia
Perancang UUD

29 Mei 1945

Ir. Soekarno
menyampaikan
pidato tentang
Pancasila

10 Juli 1945

Pembukaan
Sidang Kedua
BPUPKI

14 Juli 1945

PPKI
mengesahkan
UUD 1945

18 Agustus 1945

LKPD 2

Carilah pasangan pernyataan dan jawaban di bawah ini pada kolom yang tersedia!

JAWABAN

Mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia

Merumuskan
rancangan UUD

Merumuskan
Dasar Negara

Panitia
Sembilan

PPKI

Panitia
Perancang UUD

Pembukaan dan
batang tubuh

BPUPKI

PERNYATAAN

Panitia yang merumuskan Piagam Jakarta

Pembentukan PPKI bertujuan untuk

Dokuritsu Junbi Coosakai nama Jepang dari

UUD 1945 terdiri dari

Tugas utama Sidang Kedua BPUPKI

Pembahasan sidang pertama BPUPKI

Panitia merumuskan rancangan UUD

Badan yang mengesahkan UUD

LKPD 3

Carilah nama-nama tokoh dibawah ini dan apa peran masing-masing tokoh tersebut!



Ir. Soekarno

Mr. Soepomo

Ketua BPUPKI

Drs. Muh Hatta

Dr. Radjiman
Wedyodiningrat

Wakil Ketua PPKI

Panitia Kecil
perancang UU

H. Agus Salim

Panitia Penghalus
Bahasa

Ketua PPKI

REFLEKSI

Menurut kalian, apakah arti penting UUD NRI 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia?

Dari kegiatan diatas, apakah kesimpulan yang dapat kalian sampaikan?

Seberapa paham kalian tentang materi ini?

Perumusan UUD NDRI 1945

Sangat Paham

Sebagian paham

Kurang paham

Arti penting UUD NRI 1945 bagi bangsa dan negara

Sangat Paham

Sebagian paham

Kurang paham

Peran tokoh perumus UUD NRI Tahun 1945

Sangat Paham

Sebagian paham

Kurang paham